



RENCANA KERJA (RENJA)

2025



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
KECAMATAN SANGKULIRANG
2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT serta atas segala limpahan Rahmat Taufik dan Inayah-Nya, alhamdulillah kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Sangkulirang Tahun 2025. Laporan ini disusun sebagai program kerja Kecamatan Sangkulirang dalam kurun waktu tahun 2025. Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RENJA memuat tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Aspek Strategis Organisasi dan Penetapan Kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama. Namun terlepas dari itu semua, penetapan rencana kerja dapat mempermudah staf dan perangkat Kantor Camat Sangkulirang dalam merencanakan rencana anggaran dan kegiatan sekaligus untuk mengukur tingkat keberhasilan dan ketercapaian kinerja.

Penyusunan RENJA tahun 2025 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Review Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sangkulirang Tahun 2021-2026. Oleh karena itu, penyusunan RENJA tahun 2025 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Sangkulirang, evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Review Renstra tahun 2021-2026.

Akhir kata dengan telah tersusunnya RENJA tahun 2025 ini, kepada semua pihak kami ucapkan terima kasih atas bantuan dan partisipasinya, semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan RENJA ini terdapat kekurangan dan kelemahan yang memerlukan perbaikan serta penyempurnaan pada RENJA di masa yang akan datang.

Camat Sangkulirang,

H. RAHMAD, SE
Pembina / IV.a

NIP. 19660913 198604 1 002

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
BAB. I PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Landasan Hukum	9
1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan	12
1.3.1 Maksud Penyusunan	12
1.3.2 Tujuan Penyusunan	12
1.4. Sistematika Penulisan	13
BAB. II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN SANGKULIRANG TAHUN LALU	14
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sangkulirang 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Sangkulirang	14
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sangkulirang	21
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sangkulirang	28
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	30
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	35
BAB. III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SANGKULIRANG	36
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	36
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sangkulirang	38
3.3. Program dan Kegiatan	41
BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SANGKULIRANG	45
BAB V PENUTUP	56

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1.1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja	7
Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renja Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	17
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur	26
Tabel 2.3. Review Rancangan Awal SKPD Kecamatan Sangkulirang Tahun 2023	31
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Sangkulirang	40
Tabel 3.2. Program dan Kegiatan Tahun 2024 – 2025 Kecamatan Sangkulirang	43
Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Kutai Timur Kecamatan Sangkulirang	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja OPD disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam upaya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di Kantor Kecamatan Sangkulirang secara efektif, efisien dan terarah sesuai dengan sasaran, perlu adanya rencana kerja secara terinci berdasarkan aturan, kondisi wilayah dan Sumber Daya Manusia yang ada dan rencana kebutuhan anggaran selama satu tahun.

Rencana (Kerja Renja) Kecamatan Sangkulirang membahas analisa kebutuhan kantor secara menyeluruh dan program-program yang telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten, propinsi dan pusat. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kabupaten, Propinsi dan Pusat. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Kecamatan Sangkulirang disusun dengan tahapan :

1. Persiapan Penyusunan

Persiapan penyusunan renja meliputi : (a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah (b) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah (c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan (d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan Rancangan Awal

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup: (a) Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah dan (b) Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

3. Penyusunan Rancangan

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah tersebut dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah dan sudah harus selaras dengan rancangan awal RKPD.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

5. Perumusan Rancangan Akhir Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja PD menjadi rancangan akhir Renja PD berdasarkan Perkada tentang

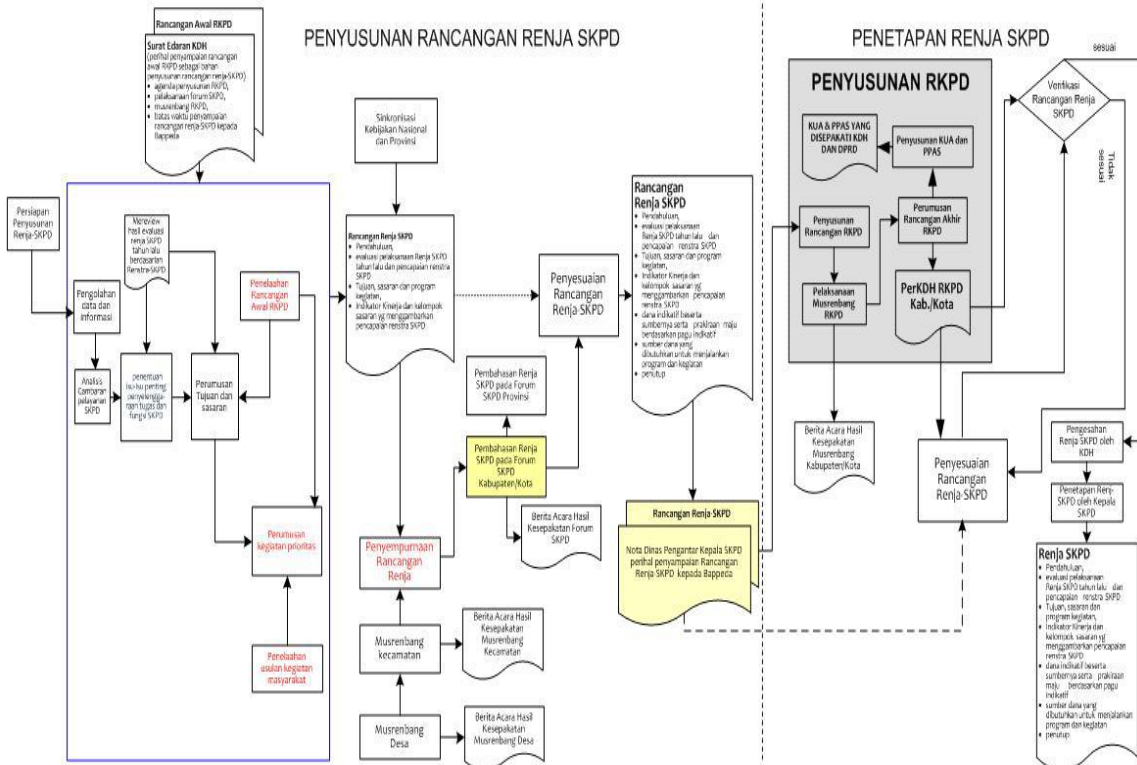
RKPD. Perumusan rancangan akhir Renja PD dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD.

Penetapan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan dengan Perkada. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah. Penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Sangkulirang Tahun 2025 menjabarkan rencana kegiatan Kecamatan Sangkulirang yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dalam penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra PD.
2. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan. Rancangan Awal Renja kemudian disempurnakan menjadi Rancangan Renja.

Penyempurnaan Rancangan Awal Renja PD mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada Rancangan Awal RKPD. Rancangan renja tersebut juga dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat



Kecamatan Sangkulirang adalah bagian dari wilayah Kabupaten Kutai Timur, terbagi dalam 15 desa dan 1 desa persiapan. Kecamatan Sangkulirang mempunyai luas wilayah ± 34.652,22 km² atau 226.721 ha yang berbatasan:

- Sebelah Utara : Kecamatan Karangas dan Kabupaten Berau
- Sebelah Timur : Kecamatan Berau
- Sebelah Selatan : Laut Makasar
- Sebelah Barat : Kecamatan Kaliorang dan Kecamatan Bengalon

Rencana kerja OPD Kecamatan Sangkulirang Tahun 2025, merupakan rencana Pembangunan Tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yaitu :

“ Menata Kutai Timur Sejahtera untuk Semua ”

Visi Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur selanjutnya diterjemahkan dalam rumusan misi. Misi menunjukkan *the reason for being* Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam rangka mewujudkan Kutai Timur sejahtera untuk semua. Misi pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, dan Bersatu.
2. Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Berbasis Sektor Pertanian.
3. Mewujudkan Pelayanan Dasar bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata
4. Mewujudkan Pemerintahan yang Partisipatif Berbasis Penegakan Hukum dan Teknologi Informasi.
5. Mewujudkan Sinergitas Pengembangan Wilayah dan Integrasi Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan.

Adapun misi kecamatan termasuk dalam misi 1 (satu) dan 4 (empat) dari 5 (lima) misi Kabupaten Kutai Timur tersebut. Peraturan tentang Kecamatan di wilayah Kabupaten Kutai Timur telah diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditegaskan kembali dengan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintahan Daerah.

Adapun tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Sangkulirang adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;

5. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
10. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
7. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112).
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19), sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2023.
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dirubah menjadi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 – 2026.

25. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 58 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024.
26. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan

1. Maksud Penyusunan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Sangkulirang Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi kecamatan dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja kecamatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan.

2. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sangkulirang tahun 2025 adalah :

1. Mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan selama kurun waktu 1 tahun yaitu tahun 2025;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan kecamatan tahun 2025;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan kecamatan tahun 2025; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kecamatan tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari Rencana Kerja OPD Kecamatan Sangkulirang Tahun 2025 sebagaimana diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Renja Kecamatan Sangkulirang Tahun lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sangkulirang
Tahun lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Sangkulirang
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sangkulirang
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Kecamatan

Bab III Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sangkulirang

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sangkulirang

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Program dan Kegiatan

Bab IV Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SANGKULIRANG TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Sangkulirang Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Sangkulirang

Pada tahun 2023, Kecamatan Sangkulirang adalah salah satu OPD yang melaksanakan urusan pemerintahan, fungsi penunjang bidang pemerintahan dengan 6 (enam) program dan 15 (lima belas) kegiatan. Berikut program-programnya yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; dan
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Adapun kegiatan-kegiatannya adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Dearah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Dearah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
10. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
11. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
12. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

13. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
14. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
15. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Anggaran Program-program Kecamatan Sangkulirang Tahun 2023 sebesar **Rp. 8.453.100.841,00** dengan realisasi anggaran sebesar **Rp. 7.860.457.291,00** atau **92,99 %**.

Indikator kinerja programnya adalah :

1. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan,
2. Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik,
3. Cakupan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan,
4. Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada,
5. Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional,
6. Cakupan Fasilitasi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan.

Sedangkan Indikator kinerja kegiatannya adalah :

1. Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja;
2. Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
4. Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
5. Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
6. Tersedianya Dokumen Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
7. Tersedianya Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
9. Tersedianya Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
10. Tersedianya Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan;

11. Jumlah Lembaga dalam Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;
12. Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
13. Tersedianya Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
14. Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, dan
15. Tersedianya Laporan Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Evaluasi kinerja didasarkan atas keberhasilan setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Program dan kegiatan diukur sampai sejauh mana keberhasilan dan realisasinya selama satu tahun. Secara umum, pencapaian kinerja Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur per 31 Desember 2023 telah dapat memenuhi tugas pokok dan fungsi yang telah dibebankan. Hal ini dapat tercermin dari realisasi anggaran yang mencapai **92,99 %**.

TABEL 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi terhadap Hasil Pelaksanaan Renja dan
Pencapaian Renstra Kecamatan Sangkulirang s/d Tahun 2024

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA SKPD	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN N-3 (2022)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2) 2023			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA SKPD TAHUN N-1 (2024)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN (2024)	
					TARGET RENSTRA SKPD TAHUN N- 2 (2023)	REALISASI RENJA SKPD TAHUN N- 2 (2023)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (N-1) 2024	TARGET CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
7	Urusan Kewilayahan									
7 01	Kecamatan		100%	95,82%	100%	92,99%	92,99%	100%	96,27%	96,27%
7 01 01 2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	97%	93,78%	98%	100%	102%	100%	97,93%	101%
7 01 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	5	6	6	100%	5	5	88,89%
7 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	1	1	1	100%	1	1	100%
7 01 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2	2	2	2	100%	2	2	100%

7 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	1	1	1	100%	1	1	100%
7 01 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3	3	3	3	100%	3	3	100%
7 01 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	1	1	1	100%	1	1	100%
7 01 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	1	1	1	100%	1	1	100%
7 01 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	1	1	1	100%	1	1	100%
7 01 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	21	13	25	15	60%	27	18	87,30%
7 01 02 2.02	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	-	1	1	-	1	1	66,67%
7 01 02 2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	2	2	2	2	100%	2	2	100%
7 01 02 2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1	1	-	-	-	1	1	66,67%

7 01 02 2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	1	-	-	-	-	-	-	0,0%
7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	92%	90,63%	95%	95%	100%	100%	95,21%	103%
7 01 03 2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1	1	1	1	100%	1	1	100%
7 01 04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada	2	-	1	-	0%	0	0	0%
7 01 04 2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	-	1	1	100%	1	1	66,67%
7 01 04 2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1	-	1	1	100%	1	1	66,67%
7 01 05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	2	3	4	4	100%	5	4	200%
7 01 05 2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1	1	1	1	100%	1	1	100%

7 01 06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Fasilitas, Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	89%	89,83%	91%	100%	110%	100%	96,61%	109%
7 01 06 2.01	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1	1	1	1	100,00%	1	1	100%

Sumber : Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kecamatan Sangkulirang

Faktor pendorong keberhasilan kinerja dikarenakan meningkatnya sumber daya manusia, dedikasi, integritas dan rasa pengabdian yang tinggi, disiplin dan moralitas pegawai kecamatan, profesionalisme, etos kerja dan sinergitas dalam melaksanakan program dan kegiatan, keterbukaan menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun, partisipasi dalam pencapaian tujuan dilaksanakan secara bersama-sama, bersikap dinamis dan tangguh dalam menghadapi perubahan perkembangan teknologi serta mampu beradaptasi dalam menghadapi pandemi dan pemulihan pasca pandemi, meningkatnya kualitas pengetahuan aparatur dalam mengoperasikan fasilitas teknologi dan mempermudah akses informasi serta publikasi data terkait kegiatan kecamatan, anggaran dan informasi lainnya, tingginya rasa tanggung jawab aparatur dan deadline penyelesaian tugas atau pekerjaan sesuai ketentuan waktu.

Faktor penghambat pencapaian kinerja dikarenakan belum optimalnya penerapan teknologi informatika dalam pelayanan publik di kecamatan, belum tercapainya indeks profesionalisme aparatur, belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, terjadinya pandemi covid – 19 yang berkepanjangan yang dapat menurunkan produktifitas kinerja, belum optimalnya penerapan peraturan Menteri dalam negeri nomor 90 tahun 2019, kurangnya sarana dan prasarana teknologi serta ketersediaan SDM yang mengakibatkan overload pekerjaan masing-masing staf.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Sangkulirang

Pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja atas sasaran yang

didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut.

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan ukuran waktu tertentu.

Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Sangkulirang. Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode renstra.

Kinerja pelayanan di Kecamatan Sangkulirang dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja program yaitu:

1. Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
3. Cakupan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan;
4. Jumlah Pelanggaran Perda / Perkada;
5. Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
6. Cakupan Fasilitasi, Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan.

Secara umum beberapa capaian kinerja pelayanan tahun 2023 menurut bidang kerja di Kecamatan Sangkulirang dapat dilihat dari beberapa kinerja sub kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi yaitu:

1. Kinerja Pelayanan di Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan :
 - a. Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah (reviu renstra, renja, dan perjanjian kinerja)
 - b. Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD (RKA murni dan perubahan)

- c. Tersedianya dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD (DPA murni dan perubahan)
 - d. Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (lkj-ip)
 - e. Tersedianya gaji dan tunjangan ASN
 - f. Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN
 - g. Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
 - h. Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD (CaLK)
 - i. Tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD
2. Kinerja Pelayanan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- a. Tersedianya rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD
 - b. Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
 - c. Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapan
 - d. Terlaksananya pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian
 - e. Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai
 - f. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas & fungsi
 - g. Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - h. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
 - i. Tersedianya peralatan rumah tangga
 - j. Tersedianya bahan logistik
 - k. Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan
 - l. Terlaksananya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - m. Terlaksananya penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
 - n. Tersedianya mebel
 - o. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
 - p. Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - q. Tersedianya jasa pelayanan umum kantor
 - r. Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan

- s. Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - t. Terlaksananya pemeliharaan aset tetap lainnya
 - u. Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
3. Kinerja Pelayanan di Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- a. Terlaksananya kegiatan koordinasi / sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal yang terkait
 - b. Tersusunnya dokumen perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan
 - c. Terlaksananya kegiatan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan
4. Kinerja Pelayanan di Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
- a. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa
 - b. Meningkatnya efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
5. Kinerja Pelayanan di Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- a. Terlaksananya sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
 - b. Terlaksananya koordiansi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik Indonesia
6. Kinerja Pelayanan di Seksi Pemerintahan Umum
- a. Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional
 - b. Terlaksananya pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya
7. Kinerja Pelayanan di Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan
- a. Terlaksananya fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa
 - b. Terlaksananya fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa
 - c. Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
 - d. Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa

- e. Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa
- f. Terlaksananya fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa
- g. Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
- h. Terlaksananya fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
- i. Terlaksananya koordinasi pendampingan desa di wilayahnya

Kinerja pelayanan kecamatan dapat diukur dari ketercapaian misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Seiring dengan misi yang dimiliki oleh Pemerintah Kecamatan Sangkulirang, faktor kunci keberhasilan yang turut mendukung pencapaian misi tersebut meliputi, yaitu:

1. Tersedianya mekanisme koordinasi yang sesuai dengan sistem kerja yang ada.
2. Tersedianya aparatur yang berkualitas.
3. Tersedianya sarana ketentraman dan ketertiban.
4. Adanya kesadaran terhadap pentingnya ketentraman dan ketertiban.
5. Tersedianya perangkat pelayanan administrasi.
6. Tersedianya data umum yang akurat.
7. Tersedianya data tata ruang yang terinci.
8. Tersedianya data wajib pajak yang lengkap.

Dengan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, maka setiap kebijakan program dan kegiatan pemerintah dapat dipastikan berjalan dengan baik. Masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang proposional, karena pada hakikatnya birokrasi itu diadakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat / rakyat sebagai pemilik kedaulatan itu sendiri.

Untuk menjamin terlaksananya pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dan sekaligus untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur memiliki sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pemerintahan yang cukup memadai yang terus dilengkapi setiap tahun.

TABEL 2.2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sangkulirang
Kabupaten Kutai Timur

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK 2022	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2025					Realisasi Capaian Tahun 2021 - 2025					Persentase Capaian Tahun ke -				
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan			97%	98%	98%	98%	100%	96%	94%	100%	-	-	98,97	95,92	102	-	-
2.	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik			21	23	25	27	30	21	13	15	-	-	100	56,52	60	-	-
3.	Cakupan Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan			92%	93%	95%	96%	98%	91%	91%	95%	-	-	98,91	97,85	100	-	-
4.	Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada			2	2	1	0	0	0	0	0	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-
5.	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			2	3	4	5	6	2	3	4	-	-	100	100	100	-	-
6.	Cakupan Fasilitasi, Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan			89%	90%	91%	92%	95%	88%	90%	100%	-	-	98,88	100	110	-	-

Sumber : Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kecamatan Sangkulirang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka ditetapkan tugas kecamatan adalah :

“Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh kepala daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah”

Sementara fungsi kecamatan adalah :

1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundangan-undangan;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
4. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
6. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa;
7. Pelaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Dari uraian di atas dapat diketahui kompleksnya tugas dan fungsi kecamatan disamping harus memfasilitasi tugas dari OPD yang lain juga harus memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi desa. Hal ini bisa terlaksana dengan baik bila didukung dengan sarana prasarana, sumber daya yang memadai dan anggaran yang dikelola, sehingga disadari pelaksanaan tugas dan kinerjanya masih perlu ditingkatkan lagi.

Disamping itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka diharapkan kecamatan sebagai pusat pelayanan dasar publik harus

mampu menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkan.

Faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Succes Factors*) merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan keberhasilan Kecamatan Sangkulirang. Hal ini disebabkan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut menjadi landasan organisasi dalam menetapkan tujuan, sasaran dan aktivitas kegiatan, sehingga lebih efisien dan efektif.

Kecamatan Sangkulirang masih memerlukan peningkatan pelayanan menghadapi tantangan, terkait dengan keterbatasan, antara lain :

1. Prasarana dan sarana yang tersedia kurang lengkap dan belum memadai;
2. Sistem kerja yang belum optimal;
3. Kompetensi sumber daya manusia yang masih kurang;
4. Kapasitas kelembagaan desa belum memadai;
5. Infrastruktur pedesaan masih kurang;
6. Enclave lahan di wilayah Kecamatan Sangkulirang perlu ditingkatkan;
7. Banyaknya kasus sengketa lahan.

2.3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Kecamatan

Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Sangkulirang dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Sangkulirang adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya penilaian yang terukur terhadap kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh Kabupaten Kutai Timur;
2. Belum adanya penilaian yang terukur terhadap akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Kabupaten Kutai Timur;
3. Kebijakan penetapan anggaran yang relatif lama dalam kaitan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sehingga berdampak pada mundurnya pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Sangkulirang.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada bagian unit kerja dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Sangkulirang, sebagai berikut :

1. Belum optimalnya partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan dan belum optimalnya penyerapan swadaya murni dari masyarakat;

2. Masih adanya ego sektoral masing-masing OPD tentang program dan kegiatan;
3. Belum optimalnya perencanaan strategis pada tingkat OPD, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan wawasan tentang bagaimana membuat rencana strategis untuk OPD tersebut selama kurun waktu 5 (lima) tahun;
4. Tingkat koordinasi aparatur kewilayahan masih rendah;
5. Belum optimalnya kapasitas aparatur kewilayahan, khususnya pemahaman tentang program dan kegiatan yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang bersangkutan;
6. Tingkat koordinasi antar lembaga kemasyarakatan dalam penanganan kebencanaan masih rendah;
7. Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap pengadaan barang dan jasa (metode swakelola).

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Sangkulirang sebagai berikut :

1. Kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) kecamatan terutama pada jajaran staf, sehingga tugas dibebankan seringkali tidak tuntas;
2. Masih belum optimalnya pelaporan kecamatan tentang program dan kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
3. Masih minimnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan;

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Sangkulirang sebagai OPD yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Sangkulirang.

Faktor internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Sangkulirang antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
2. Masih lemahnya pemahaman tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan

kinerja;

4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu system yang terpadu, efektif dan efisien;
5. Kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan (internet dan komputer).

Faktor Eksternal yang menjadi permasalahan dan isu strategis Pemerintah Kecamatan Sangkulirang antara lain :

1. Penurunan jumlah kasus stunting;
2. Pengentasan jumlah angka kemiskinan;
3. Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah;
4. Penurunan jumlah penggunaan narkoba;
5. Peningkatan pelayanan publik;

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Kecamatan Sangkulirang tahun 2023 disusun berdasarkan renstra tahun 2021 - 2026 dan membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Kutai Timur tahun 2021 - 2026 yang berdasarkan pertimbangan atas kinerja pencapaian target renstra dan target kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Sangkulirang, dengan arahan kepala daerah terkait dengan program prioritas kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan.

Setelah melalui tahapan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur, dan Musrenbang Tingkat Kabupaten Kutai Timur, maka ditetapkan untuk Perangkat Daerah Kecamatan Sangkulirang sebanyak 6 (enam) program dan 16 (enambelas) kegiatan. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan tersebut terdapat beberapa perbaikan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah diusulkan sebelumnya.

Hasil analisis terhadap rancangan awal kegiatan tersebut hingga menjadi renja yang siap untuk difinalisasikan dalam RKPD tersaji pada tabel 2.3. berikut ini :

TABEL 2.3.
Review Rancangan Awal RKPD
Kecamatan Sangkulirang Tahun 2023

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN ANALIS
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	98%	6.471.313.760	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	98%	7.266.416.100	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sangkulirang	Jumlah Dokumen Perencaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	75.519.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sangkulirang	Jumlah Dokumen Perencaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	75.519.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Sangkulirang	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	4.673.566.908	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Sangkulirang	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	5.054.575.841	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Sangkulirang	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2	19.575.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Sangkulirang	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2	19.575.000	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Sangkulirang	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	251.605.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Sangkulirang	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	510.352.000	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sangkulirang	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3	578.118.932	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sangkulirang	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	3	704.275.339	

6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Sangkulirang	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	157.263.850	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Sangkulirang	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	157.263.850	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sangkulirang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	296.800.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sangkulirang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	316.800.000	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sangkulirang	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	418.865.070	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sangkulirang	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	428.055.070	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	25	75.669.066	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	25	75.669.066	
9	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sangkulirang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	10.000.000	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sangkulirang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1	10.000.000	
10	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecaatan	Kecamatan Sangkulirang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	2	65.669.066	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecaatan	Kecamatan Sangkulirang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	2	65.669.066	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Cakupan Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	95%	232.464.320	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Cakupan Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	95%	318.370.913	
11	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Sangkulirang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1	232.464.320	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Sangkulirang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1	318.370.913	

4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada	1	65.632.620	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada	1	65.632.620	
12	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Sangkulirang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	22.000.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Sangkulirang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	22.000.000	
13	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Sangkulirang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1	43.632.620	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kecamatan Sangkulirang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1	43.632.620	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4	370.970.060	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4	370.970.060	
14	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Sangkulirang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1	370.970.060	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Sangkulirang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1	370.970.060	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Cakupan Fasilitas, Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	91%	356.042.082	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Cakupan Fasilitas, Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	91%	356.042.082	
15	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Sangkulirang	Jumlah Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1	356.042.082	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Sangkulirang	Jumlah Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1	356.042.082	
JUMLAH					7.572.091.908	JUMLAH					8.453.100.841

Berdasarkan tabel diatas, tidak ada perubahan signifikan yang terjadi dalam program dan kegiatan yang telah disusun berdasarkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan atau realisasi selama tahun berjalan.

Namun demikian, besaran pagu indikatif / kebutuhan dana tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena kenaikan pendapatan daerah sehingga terjadi kenaikan besaran pagu indikatif sebesar Rp.881.008.933,00 yang semula sebesar Rp.7.572.091.908,00 menjadi Rp.8.453.100.841,00.

Sementara itu, rancangan awal RKPD Kecamatan Sangkulirang tahun 2025 disusun berdasarkan renstra tahun 2021 - 2026 dan membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Kutai Timur tahun 2021 - 2026 yang berdasarkan pertimbangan atas kinerja pencapaian target renstra dan target kinerja yang dicapai oleh Kecamatan Sangkulirang, dengan arahan kepala daerah terkait dengan program prioritas kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan.

Rancangan Awal Kecamatan Sangkulirang tahun 2025 sebanyak 6 (enam) program dan 17 (tujuhbelas) kegiatan, yaitu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja OPD.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan OPD.
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan OPD.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
 - b. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.
 - c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
 - b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
 - b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada tahun 2023 tidak ada pengusulan program dan kegiatan masyarakat di wilayah Kecamatan Sangkulirang terhadap program dan kegiatan Kecamatan Sangkulirang.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SANGKULIRANG

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tujuan kebijakan nasional pemerintah republik indonesia adalah reformasi birokrasi, ada 4 tujuan reformasi birokrasi dengan 8 area perubahan antara lain :

1. Pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dengan area perubahan :
 - Manajemen perubahan (mind set dan culture set)
 - Penguatan pengawasan
 - Penguatan akuntabilitas kinerja
2. Efektivitas dan efisiensi kegiatan pemerintahan, dengan area perubahan:
 - Penataan dan penguatan organisasi
 - Penataan sumber daya manusia (SDM)
3. Peningkatan kualitas pengambilan kebijakan, dengan area perubahan :
 - Penataan peraturan penundang-undangan
 - Penataan tatalaksana
 - Peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan area perubahan
 - Peningkatan kualitas pelayanan publik

Kualitas penyelenggaraan pelayanan umum (*publik*) di daerah masih perlu ditingkatkan ke arah yang lebih baik. Banyak hal yang menyebabkan belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan tersebut, misalnya keterbatasan sarana pelayanan, perilaku petugas yang belum bersifat melayani, tidak jelasnya waktu, dan biaya yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan publik serta panjangnya prosedur yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu jenis pelayanan publik.

Oleh karenanya daerah diharapkan terus memiliki prakarsa dalam melakukan perbaikan pelayanan. Prakarsa daerah dalam meningkatkan pelayanan publik tentunya harus sesuai kebutuhan dan sesuai dengan kepuasan masyarakat. Masyarakat berhak memberikan masukan, koreksi dan perbaikan terhadap pelayanan. Inilah yang disebut manajemen publik masa kini (*new publik management*) yang memiliki ciri bahwa kewenangan berada pada petugas pelayanan dan pelanggan, menekankan pada pelayanan yang “*menyentuh hati*” dan perombakan visi dan misi pelayanan. Dengan demikian, masyarakat dianggap

sebagai pemilik saham (*shareholder*) sehingga pelayanan lebih menekankan pada kualitas sebagai hasil negosiasi kepentingan masyarakat dan pemerintah. Dengan kata lain posisi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik berubah dari “*dilayani*” menjadi “*melayani*”.

Posisi kecamatan menjadi sangat penting mengingat banyak pihak berharap agar kecamatan mampu berperan sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat. Fungsi kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat ini menjadi relevan bila dilihat dari segi kedekatan jarak, kecepatan waktu dan kualitas pelayanan yang diberikan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang merupakan bentuk jawaban dan respon dari pemerintah akan tuntutan perbaikan kualitas pelayanan publik khususnya di pelayanan yang bersifat administratif dimana pemerintah menetapkan kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan administrasi yang terdepan dengan tujuan terpenuhinya prinsip-prinsip pelayanan agar pelayanan semakin dekat dengan masyarakat sehingga pelayanan akan semakin efektif dan efisien. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tatanan pengelolaan manajemen yang ditandai dengan penerapan prinsip – prinsip tertentu, diantaranya : keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi.

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut dilakukan pada seluruh aspek manajemen penyelenggara pemerintahan dan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendaliannya. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan terwujud dalam pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang berkualitas dan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang tinggi. Ketiganya merupakan prasyarat keberhasilan pembangunan. Tanpa pemerintahan yang bersih akan sulit dicapai pengelolaan sumber daya pembangunan secara akuntabel yang akan berakibat langsung pada menurunnya kualitas pelayanan publik serta menghilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Sangkulirang

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Tujuan dan sasaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan.

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi, dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Setiap semua yang akan melakukan sesuatu tentu mempunyai sebuah tujuan. Tujuan adalah pernyataan tentang keadaan di mana suatu organisasi ingin mencapai ini dan pernyataan tentang keadaan organisasi di masa depan sebagai upaya bersama untuk itu.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Visi adalah cara pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana organisasi harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan eksis, mempunyai kreativitas, antisipati, inovatif serta produktif. Visi juga merupakan gambaran yang menantang tentang kondisi masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh organisasi.

Berdasarkan pengertian dimaksud serta didasari oleh potensi kecamatan, maka disusun Visi Kecamatan Sangkulirang yaitu : **“Menata Sangkulirang untuk Kemajuan”**. Pernyataan visi Kecamatan Sangkulirang ini tidak terlepas dari visi Kabupaten Kutai Timur karena Kecamatan Sangkulirang merupakan bagian integral dari Kabupaten Kutai Timur dimana segala aspek pembangunan harus terpadu agar terciptanya sistem pemerintah yang efektif, sinergi, dan optimal.

Penjabaran dari visi Kecamatan Sangkulirang dengan melakukan fungsi pelayanan yaitu menjadi organisasi yang proaktif di dalam menjalankan pembinaan masyarakat dan desa yang ada di wilayah Kecamatan Sangkulirang. Koordinasi dan fasilitasi pembangunan dilaksanakan dalam rangka melakukan perencanaan pembangunan di tingkat masyarakat dan disalurkan melalui Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur serta mengawal dan memelihara hasil pembangunan yang ada sehingga bermanfaat dan dapat mewujudkan Masyarakat Kecamatan Sangkulirang yang Maju, Mandiri dan Sejahtera.

Untuk itu Kecamatan Sangkulirang menetapkan misi yang mengacu pada Misi Kabupaten Kutai Timur diantaranya sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pelayanan pemerintahan umum dan administrasi secara transparan;
2. Menyelenggarakan pemerintahan umum kecamatan dan pembinaan pemerintahan desa;
3. Menyelenggarakan pembangunan secara partisipatif dan pemberdayaan masyarakat;
4. Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan data sosial yang berkualitas;
5. Meningkatkan pelayanan dan responsif terhadap pengaduan masyarakat;
6. Memperkuat koordinasi lintas sektoral dan lembaga kemasyarakatan untuk ketentraman dan ketertiban umum.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Sangkulirang, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Kecamatan Sangkulirang sebagai berikut:

1. Tujuan

- a. Meningkatnya Nasionalisme dan Persatuan Masyarakat;
- b. Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik kepada Masyarakat.

2. Sasaran

- a. Meningkatnya Wawasan Kebangsaan serta Persatuan dan Kesatuan Masyarakat;
- b. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan;
- c. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan, Aset, Pelayanan Publik dan Pemerintahan Desa;
- e. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan;
- f. Meningkatnya Kinerja Kecamatan.

TABEL 3.1.
Tujuan dan Sasaran
Perangkat Daerah Kecamatan Sangkulirang

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Nasionalisme dan Persatuan Masyarakat	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan serta Persatuan dan Kesatuan Masyarakat	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100	100	100	100	100
2.	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan	Persentase pengendalian ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Persentase pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa	100	100	100	100	100
3.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik kepada Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan, Aset, Pelayanan Publik dan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan pelaporan keuangan tertib dan baik	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Rata-rata nilai survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan	82	82,25	82,5	82,75	83
		Meningkatnya Kinerja Kecamatan	Nilai predikat AKIP (Nilai AKIP merupakan hasil pengukuran kinerja OPD)	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

A. Program

Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan kecamatan guna mencapai sasaran tertentu.

Program yang akan dilaksanakan Kecamatan Sangkulirang selama tahun 2024 antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

B. Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang, modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan-kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari program merupakan langkah terakhir dalam upaya pencapaian tujuan. Kegiatan indikatif Kecamatan Sangkulirang Tahun 2024 harus mampu menghasilkan output dan outcome yang memadai sebagai syarat tercapainya tujuan.

Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Sangkulirang selama tahun 2024 antara lain :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
10. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
11. Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
12. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
13. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
14. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
15. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
16. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

TABEL 3.2.
Program dan Kegiatan Tahun 2023 – 2024
Kecamatan Sangkulirang

TUJUAN	SASARAN	KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Kerangka Pendanaan			
								Tahun 2023		Tahun 2024	
								TARGET	Rp	TARGET	Rp
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat	Meningkatnya Kinerja Kecamatan	7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PADA KANTOR CAMAT SANGKULIRANG	CAKUPAN PELAYANAN ADMINISTRASI PENUNJANG URUSAN DAN LAPORAN KEUANGAN	98 %	6.471.313.760	100 %	7.344.961.661
						KEGIATAN :					
Meningkatnya Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan Kecamatan	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan program dan perencanaan kecamatan	7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100 %	75.519.000	5 Dokumen	189.145.000
	Terwujudnya tertib administrasi pelaporan keuangan kecamatan	7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	4.673.566.908	1 Laporan	5.488.681.661
	Terwujudnya tertib administrasi umum kecamatan	7	01	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	19.575.000	2 Dokumen	64.250.000
	Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian kecamatan	7	01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	251.605.000	1 Laporan	493.200.000
		7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	578.118.932	3 Laporan	540.685.000
		7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	157.263.850	1 Dokumen	90.000.000
		7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 jasa	296.800.000	1 Laporan	279.000.000
		7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	418.865.070	1 Laporan	200.000.000
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	JUMLAH PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK	25 pelayanan	75.669.066	27 pelayanan	182.520.000
						KEGIATAN :					
		7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tersedianya Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	10.000.000	1 Laporan	10.000.000
		7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	19,05 %	65.669.066	2 Laporan	50.000.000
		7	01	02	2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Tersedianya Dokumen Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	-	-	1 Dokumen	122.520.000
Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	CAKUPAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI WILAYAH KECAMATAN	95 %	232.464.320	100 %	150.000.000
						KEGIATAN :					
		7	01	03	2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga dalam Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	232.464.320	1 Laporan	150.000.000
Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Ketertarikan dan Keterlibatan di Wilayah Kecamatan	7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETERTAMRAN DAN KETERTIBAN UMUM	JUMLAH PELANGGARAN PERDA / PERKADA	1 Pelanggaran	65.632.620	0 Pelanggaran	50.000.000
						KEGIATAN :					
Optimalisasi Tingkat Pembinaan dan Pengawasan kepada Masyarakat	Meningkatnya ketertarikan dan keterlibatan di wilayah kecamatan	7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum	100 %	22.000.000	1 Laporan	20.000.000
	Terwujudnya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	7	01	04	2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Tersedianya Laporan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	43.632.620	1 Laporan	30.000.000

Meningkatnya Nasionalisme dan Persatuan Masyarakat	Meningkatnya wawasan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan masyarakat	7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	JUMLAH PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL	4 pembinaan	370.970.060	8 Kegiatan	518.450.000
						KEGIATAN :					
Meningkatnya Nasionalisme dan Persatuan Masyarakat	Meningkatnya wawasan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan masyarakat	7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	3 fasilitasi	370.970.060	1 Laporan	518.450.000
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat	Meningkatnya Kualitas tata kelola keuangan, aset, pelayanan publik dan pemerintahan desa	7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	CAKUPAN FASILITASI, PEMBINAAN, PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	91 %	356.042.082	100 %	237.000.000
						KEGIATAN :					
		7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Wilayah Kecamatan	3 rekomendasi	356.042.082	1 Laporan	237.000.000
JUMLAH									7.572.091.908		8.482.931.661

Sumber : Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kecamatan Sangkulirang

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SANGKULIRANG

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indicator keluaran (output) kegiatan maupun keluaran program (outcome), sasaran dari kegiatan, satuan, volume, target, serta lengkap dalam matrik rencana kerja perangkat daerah.

Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur merencanakan 6 Program dan 17 Kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari APBD Kabupaten Kutai Timur sebesar **Rp.10.356.566.208,00**. Secara keseluruhan ada 6 (Enam) program yang merupakan program prioritas secara terinci dalam beberapa program dan kegiatan, yaitu sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja OPD.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan OPD.
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan OPD.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
 - b. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum.
 - c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.
 - b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
 - b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
 - a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

TABEL. 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan
Perkiraan Maju Tahun 2026 Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2026	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Urusan Kewilayahan								
7. 01.	Kecamatan				10.356.566.208				11.392.222.829
7. 01. 01	I PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	Kecamatan Sangkulirang	100 %	9.417.414.133	APBD II		100 %	10.359.155.546
7. 01. 01. 2.01	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Sangkulirang	5 Dokumen	109.052.000			5 Dokumen	119.957.200
7. 01. 01. 2.01. 01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		7 Dokumen	73.640.000			7 Dokumen	81.004.000
7. 01. 01. 2.01. 06	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	35.412.000			1 Laporan	38.953.200
7. 01. 01. 2.02	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Sangkulirang	1 Laporan	7.683.561.207			1 Laporan	8.451.917.328
7. 01. 01. 2.02. 01	3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		41 Orang/bulan	7.356.566.207			41 Orang/bulan	8.092.222.828
7. 01. 01. 2.02. 03	4 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD		4 Dokumen	264.398.000			4 Dokumen	290.837.800
7. 01. 01. 2.02. 07	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD		5 Laporan	62.597.000			5 Laporan	68.856.700
7. 01. 01. 2.03	3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kecamatan Sangkulirang	2 Dokumen	16.830.000			2 Dokumen	18.513.000

7.	01.	01.	2.03.	01		6	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		2	Dokumen	16.830.000			2	Dokumen	18.513.000
7.	01.	01.	2.05		4		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Sangkulirang	1	Laporan	332.022.000			1	Laporan	365.224.200
7.	01.	01.	2.05.	02		7	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		3	Paket	111.489.000			3	Paket	122.637.900
7.	01.	01.	2.05.	03		8	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		41	Dokumen	26.121.000			41	Dokumen	28.733.100
7.	01.	01.	2.05.	09		9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		20	Orang	194.412.000			20	Orang	213.853.200
7.	01.	01.	2.06		5		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Sangkulirang	3	Laporan	578.326.036			3	Laporan	636.158.640
7.	01.	01.	2.06.	01		10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1	Paket	6.411.000			1	Paket	7.052.100
7.	01.	01.	2.06.	02		11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket n Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4	Paket	42.000.000			4	Paket	46.200.000
7.	01.	01.	2.06.	03		12	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1	Paket	15.358.000			1	Paket	16.893.800
7.	01.	01.	2.06.	04		13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2	Paket	48.830.000			2	Paket	53.713.000
7.	01.	01.	2.06.	05		14	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		3	Paket	18.853.036			3	Paket	20.738.340
7.	01.	01.	2.06.	07		15	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		1	Paket	19.162.000			1	Paket	21.078.200
7.	01.	01.	2.06.	08		16	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		1	Laporan	134.425.000			1	Laporan	147.867.500
7.	01.	01.	2.06.	09		17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		4	Laporan	275.290.000			4	Laporan	302.819.000
7.	01.	01.	2.06.	10		18	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		2	Dokumen	17.997.000			2	Dokumen	19.796.700
7.	01.	01.	2.07		6		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sangkulirang	1	Dokumen	382.672.890			1	Dokumen	420.940.179
7.	01.	01.	2.07.	05		19	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		5	Unit	127.665.000			5	Unit	140.431.500
7.	01.	01.	2.07.	06		20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		15	Unit	154.207.890			15	Unit	169.628.679
7.	01.	01.	2.07.	10		21	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		8	Unit	100.800.000			8	Unit	110.880.000

7.	01.	01.	2.08	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sangkulirang	1 Laporan	211.000.000		1 Laporan	232.100.000
7.	01.	01.	2.08.	02	22 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		4 Laporan	57.000.000		4 Laporan	62.700.000
7.	01.	01.	2.08.	03	23 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	10.000.000		1 Laporan	11.000.000
7.	01.	01.	2.08.	04	24 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 Laporan	144.000.000		12 Laporan	158.400.000
7.	01.	01.	2.09	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Sangkulirang	1 Laporan	103.950.000		1 Laporan	114.345.000
7.	01.	01.	2.09.	02	25 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara atau Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		8 Unit	103.950.000		8 Unit	114.345.000
7.	01.	02		II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Kecamatan Sangkulirang	27 Pelayanan	65.789.000	APBD II	27 Pelayanan	72.367.900
7.	01.	02.	2.02	9	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kecamatan Sangkulirang	2 Laporan	16.212.000		2 Laporan	17.833.200
7.	01.	02.	2.02.	03	26 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sangkulirang	1 Laporan	16.212.000		1 Laporan	17.833.200
7.	01.	02.	2.03	10	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kecamatan Sangkulirang	1 Dokumen	32.747.000		1 Dokumen	36.021.700
7.	01.	02.	2.03.	01	27 Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi Sinergi dengan Perangkat Daerah dan atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		1 Dokumen	32.747.000		1 Dokumen	36.021.700
7.	01.	02.	2.04	11	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Sangkulirang	1 Laporan	16.830.000		1 Laporan	18.513.000
7.	01.	02.	2.04.	02	28 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan		1 Laporan	16.830.000		1 Laporan	18.513.000
7.	01.	03		III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sangkulirang	100 %	154.878.000	APBD II	100 %	170.365.800
7.	01.	03.	2.01	12	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kecamatan Sangkulirang	1 Laporan	81.037.000		1 Laporan	89.140.700

7.	01.	03.	2.01.	01		29	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		75	Lembaga Kemasyarakatan	22.907.000				75	Lembaga Kemasyarakatan	25.197.700
7.	01.	03.	2.01.	03		30	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		1	Laporan	58.130.000				1	Laporan	63.943.000
7.	01.	03.	2.06		13		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan	Kecamatan Sangkulirang	1	Laporan	73.841.000				1	Laporan	81.225.100
7.	01.	03.	2.06.	06		31	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing		30	Keluarga	15.074.000				30	Keluarga	16.581.400
7.	01.	03.	2.06.	07		32	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		100	Keluarga	58.767.000				100	Keluarga	64.643.700
7.	01.	04			IV		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada Kecamatan Sangkulirang	Kecamatan Sangkulirang	0	Pelanggaran	75.828.000	APBD II			0	Pelanggaran	83.410.800
7.	01.	04.	2.01		14		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Sangkulirang	1	Laporan	50.737.000				1	Laporan	55.810.700
7.	01.	04.	2.01.	01		33	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		1	Laporan	30.218.000				1	Laporan	33.239.800
7.	01.	04.	2.01.	02		34	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		1	Laporan	20.519.000				1	Laporan	22.570.900
7.	01.	04.	2.02		15		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		1	Laporan	25.091.000				1	Laporan	27.600.100
7.	01.	04.	2.02.	01		35	Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		1	Laporan	25.091.000				1	Laporan	27.600.100
7.	01.	05			V		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Sangkulirang	8	Kegiatan	312.280.500	APBD II			8	Kegiatan	343.508.550

7.	01.	05.	2.01	16	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kecamatan Sangkulirang	1 Laporan	312.280.500			1 Laporan	343.508.550
7.	01.	05	2.01.	01	36 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		35 Orang	191.557.500			35 Orang	210.713.250
7.	01.	05	2.01.	04	37 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		35 Orang	65.981.000			35 Orang	72.579.100
7.	01.	05	2.01.	08	38 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		1 Dokumen	54.742.000			1 Dokumen	60.216.200
7.	01.	06		VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Fasilitas, Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Sangkulirang	100 %	330.376.575	APBD II		100 %	363.414.233
7.	01.	06.	2.01	17	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Sangkulirang	1 Laporan	330.376.575			1 Laporan	363.414.233
7.	01.	06.	2.01.	01	39 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		30 Dokumen	23.069.000			30 Dokumen	25.375.900
7.	01.	06.	2.01.	02	40 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		1 Dokumen	29.744.575			1 Dokumen	32.719.033
7.	01.	06.	2.01.	03	41 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		1 Dokumen	57.305.000			1 Dokumen	63.035.500
7.	01.	06.	2.01.	05	42 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		1 Dokumen	65.449.000			1 Dokumen	71.993.900
7.	01.	06.	2.01.	07	43 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		1 Dokumen	31.574.000			1 Dokumen	34.731.400
7.	01.	06.	2.01.	09	44 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		1 Dokumen	19.864.000			1 Dokumen	21.850.400

7.	01.	06.	2.01.	13		45	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif		1	Dokumen	17.170.000			1	Dokumen	18.887.000
7.	01.	06.	2.01.	15		46	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		1	Dokumen	47.359.000			1	Dokumen	52.094.900
7.	01.	06.	2.01.	17		47	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		1	Laporan	38.842.000			1	Laporan	42.726.200
JUMLAH												10.356.566.208					11.392.222.829

Sumber : Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kecamatan Sangkulirang

Pagu dana indikatif Rencana Kerja (Renja) didasarkan dengan Program dan Kegiatan yang sudah disesuaikan dengan pemutakhiran Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dirubah dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Setiap Program dan Kegiatan mempunyai indikator kinerja masing–masing seperti berikut ini :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Indikatornya : Cakupan pelayanan administrasi perkantoran dan laporan keuangan, capaian target kinerja adalah 100 %.

a. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator : Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

c. Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Indikator : Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

d. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator : Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

e. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator : Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- f. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah
Indikator : Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
- h. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Indikator : Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Indikatornya : Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Publik, capaian target kinerja adalah 27 pelayanan

- a. Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak
Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang
ada di Kecamatan
Indikator : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penyelenggaraan
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- b. Kegiatan : Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana
Pelayanan Umum
Indikator : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pemeliharaan
Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
- c. Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan
kepada Camat
Indikator : Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang Dilimpahkan kepada Camat

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Indikatornya : Cakupan Peran Masyarakat dalam Pembangunan di Wilayah Kecamatan, capaian target kinerja adalah 100 %.

- a. Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Indikator : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

b. Kegiatan : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Indikator : Jumlah Laporan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikatornya : Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada, capaian target kinerja 0 pelanggaran.

a. Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

b. Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Indikator : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikatornya : Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, target capaian kinerja 8 kegiatan.

Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Indikator : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Indikatornya : Cakupan Fasilitasi, Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan, capaian target kinerja 100 %.

Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa

Indikator : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Pengawasan Pemerintahan Desa di Wilayah Kecamatan

BAB V

PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sangkulirang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 yang mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Kutai Timur ***“Menata Kutai Timur Sejahtera untuk Semua”*** dan mengacu pada Rancangan Awal RPJMD Kutai Timur Tahun 2021-2026.

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Sangkulirang. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Sangkulirang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Sangkulirang berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sangkulirang Tahun 2025 serta diselaraskan dengan Rancangan Awal RKPD Kabupaten awal Kutai Timur Tahun 2025.
 - b. Kecamatan Sangkulirang berkewajiban untuk menyusun Ranwal Renja Kecamatan Sangkulirang Tahun 2025 dengan berpedoman pada Ranwal RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025.
 - c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Sangkulirang Tahun 2025, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun lalu.

3. Rencana Tindak Lanjut

Harapannya adalah Rencana Kerja ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan memberikan kontribusi pada pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.



2025